

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Muhammad Hidayat^{1*}
Muhammad Fikry Hadi¹
Dwi Widiarsih¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
*email: m.hidayat@umri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis kinerja dan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan otonomi daerah. Alat analisis yang digunakan berupa rasio kinerja keuangan, Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan metode kuadran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan PAD tetapi tidak diikuti dengan peningkatan peran (*share*) PAD terhadap belanja. Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah, nilai rata-rata sebesar 8,15%. Rasio Ketergantungan memiliki nilai rata-rata sebesar 42,91% yang masuk dalam kategori ketergantungan tinggi. Rasio derajat desentralisasi fiskal nilai rata-rata sebesar 6,71%. Terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kemampuan keuangan kabupaten/kota juga mengalami perubahan yang cukup berarti. Peta kemampuan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode indeks kemampuan keuangan menunjukkan adanya pergeseran kemampuan keuangan daerah kearah yang lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi lokal, melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya.

Kata kunci: IKK, Kinerja Keuangan Daerah, Pemetaan Kemampuan Keuangan

Analysis of Financial Capability the District/City in West Sumatra Province in a Period of Regional Autonomy

Abstract – This study aims to identify and analyze the performance and financial capabilities districts/cities in West Sumatra province in implementing regional autonomy. The analytical tool used in the form of financial performance ratios, Financial Capabilities Index (CCI) and the quadrant method. The results showed that in general the region experienced an increase in revenue growth but it is not followed by an increase in the role of regional revenue to local government spending. Based on the ratio of local financial independence, the average value of 8.15%. Dependency ratio has an average value of 42.91%, which fall into the category of high dependency. The ratio of the degree of fiscal decentralization average value 6.71%. There is indications still high dependence on central government. Financial capabilities the district/city also experienced significant change. Financial capability map been prepared using the financial capability index indicated a shift toward regional financial capabilities better. Various attempts have been made to improve the financial capability of local areas and encourage local economic potential, through increased regional revenue and investment based on potential.

Keywords: CCI, Regional Financial Performance, Mapping Financial Capability

1. PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat-pusat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat kedaerah. Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut harus diimbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya secara efektif, maka pemerintah daerah harus didukung sumber-sumber pendapatan yang pasti agar pelaksanaan dan kelangsungan kegiatan pemerintah di daerah terjamin. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000, dijelaskan bahwa keuangan daerah mengandung pengertian semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam

kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, wilayah kajian kemampuan keuangan daerah dapat mencakup aspek hak, yaitu pendapatan; dan aspek kewajiban, yaitu belanja. Untuk membiayai kewenangan daerah, PAD idealnya menjadi sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lain dapat bersifat fluktuatif dan cenderung di luar kontrol kewenangan daerah. Melalui kewenangan yang dimiliki, daerah diharap dapat meningkatkan PAD, seraya tetap memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas.

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan revisi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Mengingat kajian meliputi APBD Tahun Anggaran 2012-2013, maka struktur anggaran ini akan mengambil struktur anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan Anggaran

Berbasis Kinerja atas dasar pengelolaan anggaran sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002. Berikut adalah gambaran perkembangan APBD dengan struktur APBD yang telah di komparasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pada Tabel 1.

Tabel 1 : Realisasi PAD dan Dana Perimbangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, Tahun Anggaran 2012-2013

Kabupaten / Kota	2012		2013	
	PAD	Dana Perimbangan	PAD	Dana Perimbangan
Kab. Kep Mentawai	37,030.00	420,730.00	31,009.70	547,560.00
Kab. Pesisir Selatan	39,369.00	711,700.00	49,683.00	805,720.00
Kab. Solok	26,615.00	598,710.00	31,500.00	687,750.00
Kab. Sijunjung	32,810.00	456,220.00	33,965.96	539,502.48
Kab. Tanah Datar	53,779.00	588,090.00	63,839.00	351,420.00
Kab. Padang Pariaman	32,420.00	644,370.00	42,584.00	750,870.00
Kab. Agam	41,573.00	697,450.00	49,469.00	765,690.00
Kab. Lima Puluh Kota	24,936.00	622,660.00	28,861.36	712,744.16
Kab. Pasaman	32,550.00	470,567.60	32,140.31	549,344.12
Kab. Solok Selatan	29,513.00	374,090.00	22,268.00	426,410.00
Kab. Dharmas Raya	37,510.00	417,960.00	31,587.00	477,810.00
Kab. Pasaman Barat	32,915.30	539,210.00	36,906.00	619,300.00
Kota Padang	189,464.00	1,044,620.00	238,916.00	1,142,550.00
Kota Solok	27,545.00	324,340.00	24,259.00	361,370.00
Kota Sawah Lunto	37,669.00	315,690.00	37,092.00	345,460.00
Kota Padang Panjang	32,422.00	309,010.00	41,516.00	336,120.00
Kota Bukittinggi	41,841.00	360,350.00	55,202.00	408,800.00
Kota Payakumbuh	50,704.00	370,470.00	54,179.00	344,020.00
Kota Pariaman	17,639.00	351,420.00	20,640.00	396,600.00
TOTAL	818,304.30	9,617,657.60	925,617.32	10,569,040.76

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2014

Dari gambaran realisasi PAD dan Dana Perimbangan pemerintah kabupaten/kota Sumatera Barat tahun anggaran 2012-2013, menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2012-2013 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Sebaliknya sebagaimana yang telah terjadi bahwa kebutuhan belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah dimana pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah,

namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Bappenas, 2003).

Berbagai upaya telah dilakukan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi lokal, melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksekutif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian secara mendalam mengenai kemampuan keuangan daerah, yang dalam kasus ini dibatasi pada kemampuan keuangan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.

2. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan Bisma dan Hery (2010) bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kerja keuangan Pemerintah NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007. Data yang digunakan berupa data sekunder dari sumber primer yang akan dapatkan dari Pemerintah NTB yang telah diterbitkan. Alat analisis yang digunakan; Pertama, Analisis Kinerja Keuangan yang terdiri dari: tingkat independen, tingkat ketergantungan, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas dan Efisiensi. Kedua, untuk memperkuat hasil dari kinerja keuangan juga menggunakan kinerja Analisis PAD. Berdasarkan analisis kinerja keuangan daerah, secara umum Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2003-2007 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain; Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat Tinggi terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang. Desentralisasi Fiskal Cukup mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Efektifitas pengelolaan APBD Sangat Efektif, namun Efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil Tidak Efisien. Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum sumbangan

PAD (*share*) terhadap total pendapatan daerah Provinsi NTB TA 2003-2007 masih rendah, namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Kendati tetap terjadi peningkatan pada PAD, namun apabila dibandingkan dengan peningkatan Belanja, maka proporsi peningkatan PAD sangat kecil. Berdasarkan pengukuran Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Provinsi NTB berada pada skala indeks 0,54 selanjutnya diklasifikasikan menurut Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah adalah Provinsi dengan kemampuan keuangan Tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah Provinsi NTB lebih disebabkan karena besaran subsidi atau bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menunjukkan kemandirian daerah dan kewenangan luas dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Penelitian Hasan *et.al.* (2013) dengan judul Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Struktur PAD dan APBD berdasarkan komposisinya, (2)

Pertumbuhan PAD serta kontribusinya terhadap APBD dan (3) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam melaksanakan otonomi daerah. Hasil penelitian antara lain menyimpulkan bahwa komposisi PAD terbesar berasal dari penerimaan lain-lain yang sah yaitu 42,32%, komposisi terbesar dari APBD bersumber dari dana perimbangan sebesar 83,49%. Rata-rata pertumbuhan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 18,48%; rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 6,33%. Kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Batang Hari, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang memiliki status kemampuan keuangan tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil peta kinerja keuangan kabupaten/kota se-Jawa dan Bali dengan menggunakan rasio growth dan rasio share yang dilakukan oleh Samora (2010), memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap 39 kabupaten/kota se-Jawa dan Bali, terdapat 5 daerah yang berada pada kuadran I (daerah mandiri dan berpotensi), 16 daerah yang berada pada kuadran II (daerah tidak mandiri dan berpotensi), 6 daerah pada kuadran III (daerah mandiri dan kurang berpotensi),

dan 12 daerah pada kuadran IV (daerah tidak mandiri dan kurang berpotensi). Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah masih belum berhasil menciptakan kemandirian daerah mengingat 72% kabupaten/kota se-Jawa dan Bali masih dikategorikan sebagai daerah tidak mandiri. Secara umum, strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah ialah intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada Kuadran I, pemerintah daerah sebaiknya mempertahankan situasi yang kondusif sehingga pos BHP, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba BUMD dapat terus dipertahankan, bahkan meningkat. Untuk pos BHP, pemerintah daerah harus memfokuskan pada sumber daya alam yang terbarukan. Pada Kuadran II, strategi pemerintah daerah tidak berbeda jauh dengan strategi Kuadran I mengingat karakteristik Kuadran I dan Kuadran II hampir sama. Pada Kuadran III, pemerintah daerah sebaiknya mengimplementasikan kebijakan intensifikasi dan pengawasan secara ketat mengingat hampir semua pos penerimaan daerah mengalami pergerakan tidak konsisten. Pada Kuadran IV, pemerintah daerah sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disertai dengan

intensifikasi pos BHP, BHBP dan Laba BUMD.

3. METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

1) Analisis Kinerja Keuangan

Daerah

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan. Rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai berikut (Halim, 2001):

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepadamasyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan pada Tabel 2. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Hersey dan Blanchard mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu: 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial), 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Halim, 2001)

Tabel 2 : Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemampuan Keuangan	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
25	Rendah Sekali	Tidak Mampu	Instruktif
25 – 50	Rendah	Kurang Mampu	Konsultif
51 – 75	Sedang	Cukup Mandiri	Partisipatif
76 – 100	Tinggi	Sudah Mandiri	Delegatif

Sumber : Hasan Basri, Syaparuddin, Junaidi – 2013

b) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa Subsidi}}$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat tabel 3 dibawah.

Tabel 3 : Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

c) Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur

dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4 : Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

2) Analisis Kemampuan Keuangan

Daerah

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah, pada tahap awal dimulai dengan Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran.

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode *i*

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah Periode *i-1*

Tabel 5 : Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> disertai nilai <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD-nya kecil. Di sini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bappenas, 2003

Tahap analisis kemampuan keuangan daerah berikutnya adalah dengan cara menghitung Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*),

Indeks Elastisitas, dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen.

Dalam menyusun indeks untuk setiap komponen IKK, dilakukan dengan cara menggunakan persamaan umum sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X = \frac{\text{Nilai} \times \text{Hasil Pengukuran} - \text{Nilai} \times \text{Kondisi Minimum}}{\text{Nilai} \times \text{Kondisi Maksimum} - \text{Nilai} \times \text{Kondisi Minimum}}$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka persamaan IKK dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IKK = \frac{X_G + X_E + X_S}{3}$$

Keterangan:

- = Indeks Pertumbuhan (PAD)
- = Indeks Elastisitas (Belanja Langsung Terhadap PAD)
- = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

Tabel 6 : Kriteria Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,44 – 1,00	Tinggi

Sumber: Bappenas, 2003

4. HASIL DAN PEMBAHASAN *Analisis Kinerja Keuangan Daerah*

Berdasarkan rasio tingkat kemandirian keuangan daerah pada Tabel 7 dibawah dapat diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 2013 dengan nilai rata-rata sebesar 8,15% menunjukkan persentase tingkat kemandirian daerah berstatus rendah

sekali dan apabila dikaitkan dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah berada pada pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial) ini berarti bahwa kemampuan PAD untuk menopang pendanaan

pembangunan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat belum mampu untuk berotonomi.

Selanjutnya daerah yang tertinggi nilai rasio kemandirian daerah yaitu Kota Padang dengan nilai sebesar 20,42% dan nilai ini juga belum bisa menghantarkan Kota Padang menjadi daerah yang mandiri. Sementara itu nilai rasio terendah adalah Kota Pariaman.

Secara keseluruhan daerah dengan kategori kota memiliki nilai rasio lebih besar daripada kabupaten hal ini mengindikasikan keseluruhan daerah terutama yang paling rendah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi produktif dan adanya dukungan kualitas sumber daya manusiayang memadai sebagai penggerak roda pembangunan.

Tabel 7 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan, dan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2013

Kabupaten / Kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Ketergantungan	Rasio Desentralisasi Fiskal
Kab. Limapuluh Kota	4.05%	16.29%	3.24%
Kab. Agam	6.02%	24.96%	4.85%
Kab. Kepulauan Mentawai	5.73%	67.40%	5.28%
Kab. Padang Pariaman	5.33%	26.75%	4.44%
Kab. Pasaman	5.85%	59.34%	5.33%
Kab. Pesisir Selatan	4.98%	20.22%	3.99%
Kab. Sijunjung	6.30%	35.31%	5.34%
Kab. Solok	4.30%	23.40%	3.63%
Kab. Tanah Datar	9.97%	75.16%	8.80%
Kota Bukit Tinggi	13.29%	82.38%	11.45%
Kota Padang Panjang	10.78%	49.12%	8.84%
Kota Padang	20.42%	48.30%	14.35%
Kota Payakumbuh	12.37%	48.62%	9.86%
Kota Sawahlunto	11.26%	73.14%	9.76%
Kota Solok	8.99%	43.29%	7.44%
Kota Pariaman	3.82%	23.89%	3.29%
Kab. Pasaman Barat	6.82%	40.38%	5.83%
Kab. Dharmasraya	8.27%	32.26%	6.58%
Kab. Solok Selatan	6.40%	25.00%	5.10%
Rata-rata	8.15%	42.91%	6.71%

Sumber : data diolah, 2013

Berdasarkan hasil Rasio Ketergantungan pada tabel diatas, secara keseluruhan dilihat dari nilai rata-rata yakni sebesar 42,91% yang masuk dalam kategori ketergantungan tinggi. Nilai tertinggi terdapat pada Kota Bukittinggi dengan nilai sebesar 82,38% termasuk dalam kategori sangat tinggi dan nilai terendah pada Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 16,29% termasuk kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan.

Pada tabel 7 diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa kemampuan daerah kabupaten/kota dalam membiayai rumah tangga mereka masih amat kurang, karena secara rata-rata hanya berada nilai 6,71 persen, hal ini tentu tidak lepas dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih amat kecil jika dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Adapun nilai tertinggi yakni Kota Padang dengan nilai sebesar 14,35 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nilai sebesar 3,24 persen. Keseluruhan daerah untuk dapat terus meningkatkan

pendapatan daerahnya agar dikemudian hari tidak bergantung lagi dengan bantuan pemerintah pusat.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah; *Pertama* diawali dengan Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran share dan growth kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran. *Kedua*, dengan menghitung **Indeks Kemampuan Keuangan** (IKK) dan kemudian mengklasifikasikan dengan metode Indeks Kemampuan Keuangan. Adapun metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata hitung dari indeks pertumbuhan (*growth*), Indeks Elastisitas dan Indeks Share. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen.

Berdasarkan informasi elastisitas, growth, dan share dapat ditampilkan peta kinerja PAD sebagai gambaran umum kemampuan keuangan daerah. Peta kinerja PAD ditampilkan melalui metode Kuadran dan Indeks.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan pembagian kota/kabupaten berdasarkan masing-masing kuadran.

Tabel 8 : Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Metode Kuadran periode 2012 – 2013

GROWTH (%)	
KUADRAN II	KUADRAN I
Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kab. Dharmasraya	Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Solok
KUADRAN IV	KUADRAN III
Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kota Pariaman	Kab. Solok Selatan Kab. Pasaman Barat Kab. Solok Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Limapuluh Kota

Sumber : data diolah, 2012-2013

Dari profil kemampuan keuangan dengan metode kuadran diketahui bahwa selama periode 2012-2013 jumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada masing-masing kuadran merata. Untuk kuadran I (kondisi ideal) diketahui ada 5 kab/kota, namun dari jumlah tersebut, masih didominasi oleh kota dan kabupaten hanya ada satu yaitu Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan yang berada pada kuadran II dan kuadran III (kondisi sedang) terdapat 9 kab/kota, untuk kuadran ini masih di dominasi oleh kabupaten. Sedangkan yang berada pada kuadran IV (buruk) terdapat empat kabupaten dan satu kota antara lain disebabkan oleh karena pertumbuhan PAD-nya kecil serta peranannya dalam APBD juga kecil.

Dilihat dari indikator kinerja PAD, secara umum Kota-kota di Provinsi Sumatera Barat mempunyai

kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yang menjadi perhatian, kabupaten yang mempunyai sumberdaya alam melimpah tidak serta merta menduduki kondisi kinerja PAD yang baik. Sebagai contoh, Kab Pesisir Selatan dan Kab Kepulauan Mentawai berada di Kuadran IV (buruk) dikarenakan pertumbuhan PAD-nya kecil serta peranannya dalam APBD juga kecil. Kabupaten Dharmasraya peran PAD-nya dalam belanja pembangunan juga sangat kecil (kuadran II). Kabupaten yang berada di kuadran I (ideal/baik) relatif dapat dilihat tidak memiliki sumber daya alam yang besar. Ada harapan bahwa kemandirian daerah yang diukur melalui PAD dapat dikembangkan melalui potensi-potensi

lain diluar dari sekedar bergantung kepada sumber daya alam.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar untuk menggali berbagai potensi lokal yang dimiliki. Namun demikian, tidak seluruh kabupaten dan kota siap untuk

memasuki era ini. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) berikut ini memberikan gambaran awal tingkat kesiapan daerah dalam rangka memasuki era otonomi ini dan bagaimana perkembangan kinerja keuangan daerah setelah memasuki era otonomi.

Tabel 8 : Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Metode Indeks Kemampuan Keuangan periode 2012 – 2013

KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN	PERINGKAT	STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN
Kota Padang	0.814	1	TINGGI
Kota Bukit Tinggi	0.724	1	
Kota Payakumbuh	0.645	1	
Kota Solok	0.628	1	
Kab. Tanah Datar	0.602	1	
Kab. Pasaman Barat	0.601	1	
Kota Sawahlunto	0.571	1	
Kota Padang Panjang	0.564	1	
Kab. Padang Pariaman	0.557	1	
Kab. Solok Selatan	0.543	1	
Kab. Pasaman	0.506	1	
Kab. Agam	0.460	1	
Kab. Solok	0.454	1	
Kab. Limapuluh Kota	0.428	2	
Kab. Sijunjung	0.420	2	
Kab. Dharmasraya	0.308	3	RENDAH
Kab. Kepulauan Mentawai	0.248	3	
Kota Pariaman	0.180	3	
Kab. Pesisir Selatan	0.132	3	

Sumber : data diolah, 2012-2013

Dengan metode IKK, diketahui sebanyak tiga belas kabupaten/kota yang mempunyai IKKTinggi, yaitu Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kab Tanah

Datar, Kab Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kab Padang Pariaman, Kab Solok Selatan, Kab Pasaman, Kab Agam dan Kab Solok. Berikutnya terdapat dua

Kabupaten/Kota yang mempunyai IKK Sedang yaitu Kab Limapuluh Kota dan Kab Sijunjung, sedangkan empat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kab. Dharmasraya, Kab Kep Mentawai, Kota Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam kategori IKK rendah.

Realitas ini memberikan indikasi adanya kemungkinan tingkat kesiapan daerah yang berbeda dalam memasuki era otonomi, khususnya dalam tingkat kemampuan dan pengalaman mengelola keuangan, kekayaan serta sumber-sumber potensial lain yang dimiliki. Adanya kecenderungan ketergantungan pemerintah daerah (kabupaten dan kota) yang sangat tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan, baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana bagihasil. Penurunan peran PAD ini tentu saja bukan sepenuhnya menjadi kesalahan daerah mengingat sangat terbatasnya potensi-potensi PAD yang dapat digali daerah. Sumber-sumber penerimaan potensial justru dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sementara disisi lain upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah bisa jadi tidak efektif dikarenakan sangat membebani masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat.

Walaupun belum optimal, ada dinamika dan upaya daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan mendorong potensi ekonomi local melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya. Beberapa upaya tersebut justru menimbulkan *ekses* berupa kebijakan demi peningkatan PAD yang bersifat kontra produktif terhadap peningkatan investasi. Banyak pengalaman positif daerah yang dapat dijadikan pelajaran bagi daerah lain untuk meningkatkan PAD ataupun investasi. Sehubungan dengan peningkatan PAD, pelajaran yang dapat diambil adalah: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak; (2) negosiasi ulang kerjasama dengan pihak ketiga; (3) akomodasi terhadap penerimaan dinas eks kanwil, dan; (4) optimalisasi sumbangan pihak ketiga. Sedangkan pelajaran yang terkait dengan peningkatan Investasi adalah: (1) dukungan Infrastruktur dasar dan penunjang, politik pro Investasi, dan hankam; (2) kemudahan informasi; (3) kerjasama regional; (4) revitalisasi Institusi dibidang investasi, dan; (5) pemberian fasilitas insentif.

Dilihat dari segi pengelolaan keuangan daerah, Secara umum ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak computer sebagai pendukung sistem akuntansi dinilai

cukup memadai. Namun dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada penyusunan APBD dan ketentuan pengelolaan keuangan lainnya, maka perangkat lunak yang dimiliki sekarang perlu ada penyesuaian. Setiap daerah telah menjalankan secara maksimum apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hambatan koordinasi antar lembaga masih dirasakan, baik dalam konteks vertikal ataupun horizontal. Hal ini terjadi akibat belum adanya kejelasan peraturan dan ego masing-masing pihak.

Dalam aspek sumber daya manusia, jumlah personel dinilai sudah memadai, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan sebagai konsekuensi dari: (1) implementasi peraturan dan kebijakan baru dibidang keuangan; (2) tuntutan peningkatan pelayanan dari masyarakat; (3) kemajuan teknologi, dan; (4) persaingan antar daerah, antara lain dalam hal menarik calon investor.

5. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangannya. Daerah (kabupaten dan kota) dianggap lebih sensitif terhadap kebutuhan dan potensi lokalnya yang mendorong

percepatan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan PAD. Sayangnya pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (*share*) PAD terhadap belanja. Terdapat indikasi masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan kabupaten dan kota juga mengalami perubahan yang cukup berarti. Peta kemampuan keuangan yang disusun dengan menggunakan metode indeks kemampuan keuangan menunjukkan adanya pergeseran kemampuan keuangan daerah kearah yang lebih baik. Berbagai upaya telah dilakukan daerah untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mendorong potensi ekonomi lokal, melalui peningkatan PAD dan investasi berdasarkan potensi yang dimilikinya.

b. Rekomendasi

Daerah yang berada di kuadran II dan III atau IKK sedang, perlu mendapat dorongan agar PAD-nya tumbuh (*catch up*), disertai Belanja Daerah yang rasional sesuai kemampuan riil yang dimiliki daerah. Bagi daerah yang berada di kuadran IV atau IKK rendah, tampaknya perlu ada upaya-upaya khusus yang menyentuh penataan berbagai aspek seperti: 1) Peningkatan

kualitas SDM; 2) Penyiapan sarana/prasarana dasar dan pendukung; 3) Peraturan dan perundangan yang memperhatikan aspek ekonomis, efisiensi, dan netralitas; 4) Revitalisasi lembaga-lembaga terkait, termasuk desentralisasi kewenangan perijinan investasi; 5) Kebijakan pemberian fasilitas insentif kepada investor yang lebih menarik, dan; 6) Optimalisasi potensi perekonomian lokal sehingga bermanfaat kepada daerah. Upaya-upaya khusus ini dapat dilakukan berdasarkan inisiatif sendiri ataupun dengan dukungan fasilitasi dari pihak-pihak yang kompeten.

Keberadaan PAD hendaknya dipahami sebagai hasil tambahan dari tumbuhnya investasi di daerah. Dengan demikian kebijakan peningkatan PAD tidak boleh mengorbankan kepentingan jangka panjang yang lebih berdampak luas kepada investasi sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Wulandari., 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol 5 No.2.
- Astuti, Nikmah R., Amran N., Albert L., 2014. Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado Dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 14 No. 3, pp. 56-70.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta.
- Bappenas., 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang Dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah*, Jakarta
- Basri, Syafril., 2011. Optimalisasi Penerimaan Daerah di Dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, Vol 19 No 1.
- Bisma, I Dewa Gde., Hery S., 2010. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *GaneC Swara*, Edisi Khusus Vol. 4 No. 3, pp 75-86.
- Devas, Nick Brian Binder., Anne Booth., Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
- Efendi, David., Wuryanti, Sri., 2011. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otodadi Kabupaten Nganjuk. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi*, Universitas Muhammadiyah Semarang.

- Halim, Abdul., 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Hanum, Ayu Noviani., 2010. Analisa Kemampuan Keuangan Pada Ketiga Daerah Tingkat II di Jawa Tengah Dalam Menjalankan Otonomi Daerah. *MAKSIMUM – Media Akuntansi Unimus*, Vol 1 No 1.
- Hasan, Basri., Syaparuddin., Junaidi., 2013. Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1 No. 2, pp 81-90
- Samora, Remon., 2010. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kota dan Kabupaten Se-Jawa dan Bali Tahun 2004-2008: Metode Kuadran. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 2 No. 1, pp. 65-84.
- Santoso, Sugeng., 2009. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Smooting*, Vol 1 No 1.
- Keputusan Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Lampiran 1. Hasil Perhitungan Metode Kuadran

NO	KABUPATEN/KOTA	PAD		PERTUMBUHAN PAD	BELANJA DAERAH			PERAN PAD TERHADAP BELANJA DAERAH	KUADRAN
		2012	2013		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL BELANJA		
1	Kab. Limapuluh Kota	24,936,552	28,861,360	15.74	611,168,216	327,074,619	938,242,835	3.08	3
2	Kab. Agam	41,572,950	46,021,923	10.70	666,638,835	357,789,936	1,024,428,771	4.49	4
3	Kab. Kepulauan Mentawai	34,639,147	32,480,110	-6.23	223,080,491	533,772,184	756,852,675	4.29	4
4	Kab. Padang Pariaman	31,287,090	40,075,357	28.09	626,673,280	287,544,696	914,217,976	4.38	3
5	Kab. Pasaman	26,947,566	32,140,306	19.27	354,381,364	303,711,524	658,092,888	4.88	3
6	Kab. Pesisir Selatan	40,254,535	40,051,475	-0.50	683,079,113	337,836,553	1,020,915,666	3.92	4
7	Kab. Sijunjung	33,176,079	33,965,956	2.38	371,819,759	297,438,001	669,257,760	5.08	4
8	Kab. Solok	24,652,022	29,283,853	18.79	577,251,918	271,214,929	848,466,847	3.45	3
9	Kab. Tanah Datar	53,691,048	63,926,143	19.06	532,340,659	260,872,864	793,213,523	8.06	1
10	Kota Bukit Tinggi	45,077,000	55,346,850	22.78	276,196,448	238,299,348	514,495,796	10.76	1
11	Kota Padang Panjang	32,420,607	36,750,683	13.36	223,219,489	244,104,600	467,324,089	7.86	1
12	Kota Padang	189,450,840	232,413,011	22.68	1,075,699,101	603,416,784	1,679,115,884	13.84	1
13	Kota Payakumbuh	50,708,914	51,417,825	1.40	309,935,834	244,630,271	554,566,105	9.27	2
14	Kota Sawahlunto	34,887,768	39,155,303	12.23	234,523,898	208,426,242	442,950,140	8.84	2
15	Kota Solok	23,320,508	30,188,761	29.45	251,027,935	224,704,976	475,732,911	6.35	1
16	Kota Pariaman	17,638,056	15,096,327	-14.41	260,070,476	225,752,351	485,822,828	3.11	4
17	Kab. Pasaman Barat	32,850,806	42,545,213	29.51	431,021,637	350,638,365	781,660,002	5.44	3
18	Kab. Dharmasraya	45,198,998	40,043,099	-11.41	307,818,614	311,449,826	619,268,440	6.47	2
19	Kab. Solok Selatan	22,054,660	27,428,823	24.37	255,185,456	315,327,910	570,513,366	4.81	3

Lampiran 2. Hasil Perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

NO	KABUPATEN/KOTA	PERTUMBUHAN BELANJA LANGSUNG	ELASTISITAS BELANJA LANGSUNG DENGAN PAD	INDEKS PERTUMBUHAN	INDEKS ELASTISITAS	INDEKS SHARE	IKK				
1	Kab. Limapuluh Kota	22.64	1.44	-14.41	0.69	-34.70	0.60	3.08	0.00	0.428	2
2	Kab. Agam	66.54	6.22	-11.41	0.57	-7.80	0.68	3.11	0.13	0.460	1
3	Kab. Kepulauan Mentawai	48.59	-7.80	-6.23	0.19	-2.19	0.44	3.45	0.11	0.248	3
4	Kab. Padang Pariaman	12.11	0.43	-0.50	0.97	-1.97	0.58	3.92	0.12	0.557	1
5	Kab. Pasaman	10.47	0.54	1.40	0.77	-0.21	0.58	4.29	0.17	0.506	1
6	Kab. Pesisir Selatan	17.50	-34.70	2.38	0.32	-0.12	0.00	4.38	0.08	0.132	3
7	Kab. Sijunjung	17.28	7.26	10.70	0.38	0.43	0.69	4.49	0.19	0.420	2
8	Kab. Solok	-2.19	-0.12	12.23	0.76	0.45	0.57	4.81	0.03	0.454	1
9	Kab. Tanah Datar	8.65	0.45	13.36	0.76	0.47	0.58	4.88	0.46	0.602	1
10	Kota Bukit Tinggi	51.19	2.25	15.74	0.85	0.54	0.61	5.08	0.71	0.724	1
11	Kota Padang Panjang	33.59	2.51	18.79	0.63	0.63	0.61	5.44	0.44	0.564	1
12	Kota Padang	33.60	1.48	19.06	0.84	0.73	0.60	6.35	1.00	0.814	1
13	Kota Payakumbuh	36.08	25.81	19.27	0.36	1.44	1.00	6.47	0.58	0.645	1
14	Kota Sawahlunto	-2.62	-0.21	22.68	0.61	1.48	0.57	7.86	0.54	0.571	1
15	Kota Solok	13.92	0.47	22.78	1.00	2.25	0.58	8.06	0.30	0.628	1
16	Kota Pariaman	31.63	-2.19	24.37	0.00	2.51	0.54	8.84	0.00	0.180	3
17	Kab. Pasaman Barat	18.57	0.63	28.09	1.00	6.22	0.58	9.27	0.22	0.601	1
18	Kab. Dharmasraya	22.46	-1.97	29.45	0.07	7.26	0.54	10.76	0.31	0.308	3
19	Kab. Solok Selatan	17.78	0.73	29.51	0.88	25.81	0.59	13.84	0.16	0.543	1